

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Pada hakikatnya penelitian terdahulu merupakan suatu referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tinjauan Penelitian

Peneliti	M. Reza Saputra – UNIKOM 2017	Wildan Bean Nugraha – UNIKOM 2017	Muhammad Reza Renaldi – UNIKOM 2017	Ryan Cristi Simatupang – UNIKOM
Judul	Pembingkaian Berita Kasus Plesiran Narapidana Lapas Sukamiskin Bandung	Pembingkaian Berita Kasus Korupsi E-KTP di Majalah Tempo dan Gatra (Analisis Framing	Pembingkaian Berita E-KTP Media Cetak di Kota Cimahi (Analisis Framing; Robert	Pembingkaian Berita Reformasi TNI (Analisis Framing Robert N. Entman

	(Analisis Framing Robert N. Entman di Pikiran Rakyat edisi 9 dan 11 Februari 2017)	Robert N. Entman Mengenai Kasus Korupsi E-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017	N. Entman pada Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar Edisi 9 Februari 2017)	Mengenai Pembingkai Berita Reformasi TNI di Koran Tempo Edisi 7 Februari 2018)
Teknik Penelitian	Analisis Framing	Analisis Framing	Analisis Framing	Analisis Framing
Pendekatan	Robert N. Entman	Robert N. Entman	Robert N. Entman	Robert N. Entman
Hasil	Dalam mengidentifikasi masalah, Pikiran Rakyat melihat kelalaian dari sipir saat melakukan pengawalan terhadap	Dalam mengidentifikasi masalah, Tempo melihat sebagai masalah politik dan sosial, sedangkan Gatra melihat sebagai masalah politik dan hukum. Dalam memperkirakan	Pendefinisian masalah adalah gagalnya pemerintah pusat dalam melelang blanko e-KTP yang berdampak kepada seluruh masyarakat di Kota Cimahi khususnya belum memiliki e-KTP dan pihak Disdukcapil mengeluarkan suket sebagai e-	Peta bingkai mengenai berita Reformasi TNI di Koran Tempo edisi 7 Februari 2018

	narapidana plesiran ini. Dalam memberikan keputusan moral, Pikiran Rakyat menilai izin keluar lapas disalahgunakan oleh narapidana untuk plesiran. Pikiran Rakyat menekankan penyelesaian masalah dalam penggunaan GPS yang nantinya akan digunakan oleh sipir dan narapidana yang ingin keluar lapas	penyebab masalah Tempo menilai aktor-aktor politik, sedangkan Gatra menilai dari aktor dan partai politiknya. Dalam memberikan keputusan moral, Tempo menggambarkan aktor dan partai politik yang terlibat korupsi tidak mau mengakui namanya meskipun telah ada di surat dakwaan. Sedangkan Gatra masih menggambarkan semua partai politik yang disebutkan tidak mau mengakui	KTP sementara untuk keperluan Pemilu dan administrasi bernegara. Dalam memperkirakan penyebab masalah, Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat memaparkan penyebab dari kosongnya blanko e-KTP adalah pemerintah pusat yang tidak bisa memangkan blanko e-KTP dalam proses pelelangan dan adapun isu e-KTP palsu adalah kurangnya pengawasan dari Pemerintah daerah. Dalam membuat keputusan moral, menurut Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat adalah masyarakat merasa sangat dirugikan karena belum bisa mendapatkan e-KTP yang	
--	---	---	---	--

	dan mencari pegawai sipir yang mempunyai integritas tinggi. Kesimpulannya, Pikiran Rakyat membingkai berita kasus plesiran ini hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan, wartawan tidak menggali lebih jauh mengenai siapa yang terlibat dalam kasus ini.	menerima uang dari proyek e-KTP. Tempo menekankan penyelesaian pada pengembalian uang dan mengakui kesalahannya, sedangkan Gatra menuliskan dari sisi penegakan hukum untuk secara tegas mengusut kasus proyek e-KTP. Kesimpulannya, Tempo hanya menceritakan beberapa fakta-fakta tentang persidangan dan mengisahkannya, sedangkan Gatra memiliki banyak informan dari beritanya.	berlaku seumur hidup. Menekankan penyelesaian masalah dalam kasus kosongnya blanko e-KTP menurut Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat yaitu pihak pemerintah bersedia melayani pembuatan suket untuk keperluan Pemilu hingga tanggal 15 Februari 2017 dimana hari tersebut bertepatan dengan Pemilu.	
--	---	--	--	--

Sumber: Peneliti, 2018

2.1.2. Tinjauan Komunikasi Massa

2.1.2.1. Pengertian Komunikasi Massa

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (media komunikasi massa).

Menurut Nurudin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Komunikasi Massa*, ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) yang akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu

disebarkan melalui media modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan diantara media tersebut.

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas *audience* dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain.
3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.
4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.
5. Komunikasi massa dikontrol oleh *gatekeeper* (penapis informasi). Artinya, pesan-pesan yang disebar atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau public di mana

yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubric, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai *gatekeeper*.

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam komunikasi antar-persona. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (*delayed*). (Nurudin, 2014:8-9)

2.1.3.2. Fungsi Komunikasi Massa

Sama dengan definisi komunikasi massa, ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas fungsi-fungsi komunikasi massa yang mempunyai tujuan dan latar belakang berbeda satu sama lain. Apapun yang dikemukakan, setidaknya ada beberapa benang merah bahwa komunikasi massa secara umum bisa dikemukakan, diantaranya:

- a. Informasi, fungsi ini merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun dalam beberapa hal

memiliki fungsi memberikan informasi di samping fungsi-fungsi yang lain.

- b. Hiburan, fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan.
- c. Persuasi, fungsi persuasive komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi.
- d. Transmisi budaya, meskipun paling sedikit dibicarakan, transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Demikian juga, beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari pengalaman dan pengetahuan individu.
- e. Mendorong kohesi sosial, kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan. Artinya, media massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan

mereka. Media massa memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup umat beragama, sama saja media massa itu mendorong kohesi sosial.

- f. Pengawasan. Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni *warning or beware surveillance* atau pengawasan peringatan dan *instrumental surveillance* atau pengawasan instrumental.
- g. Korelasi, adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita yang disajikan oleh seorang reporter akan menghubungkan narasumber (salah satu unsur bagian masyarakat) dengan pembaca surat kabar (unsur bagian masyarakat lain).
- h. Pewarisan sosial, dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai,

norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- i. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, tetapi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. Memang diakui bahwa komunikasi massa juga bisa berperan untuk memperkuat kekuasaan, tetapi juga sebaliknya.
- j. Menggugat hubungan trikotomi. Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, bisa disebut dengan hubungan trikotomi. Hubungan trikotomi tersebut tidak demokratis. Di sinilah komunikasi massa melalui media massa memiliki tugas penting untuk mengubah hubungan trikotomi yang tidak adil tersebut.
(Nurudin, 2014:66-90)

2.1.4. Tinjauan Media Massa dan Pers

Media massa (atau saluran) adalah media yang dihasilkan oleh teknologi modern. Hal ini perlu ditekankan sebab ada media yang bukan media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, dan lain-lain. Jadi, di sini jelas media massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. (Nuruddin, 2014:3-4)

Menurut Cangara, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi*, sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari beberapa orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Walaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. (Cangara, 2014:140-141).

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik meliputi televisi, radio, siaran film, dan media *on-line* (internet). (Ardianto, 2007:103).

Berbeda dengan pemahaman tentang media sebagai “perantara” komunikasi pada umumnya, pemahaman akan media massa lebih dari sekedar sebagai “perantara komunikasi”, akan tetapi media massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi di ruang pers. Media massa atau juga dikenal sebagai *Pers* merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Oemar Seno Adji, bahwa:

1. Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis.

2. Pers dalam arti luas, yaitu memasukan di dalamnya semua *media mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Menurut Kustadi Suhandang, bahwa pers adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. (Tamburaka, 2013:39-41)

Kemudian, mengenai fungsi utama pers, terdapat lima fungsi utama pers yang berlaku universal. Disebut universal karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap Negara yang menganut paham demokrasi, yaitu:

- a. Informasi (*to inform*), setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, factual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, etis.
- b. Edukasi (*to educate*). Seperti ditegaskan Wilbur Schramm dalam *Men, Messages and Media* (1973), bagi masyarakat, pers adalah *watcher, teacher and forum* (pengamat, guru, dan forum). Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan tunjauan atau analisis atas berbagai peristiwa dan kecenderungan yang terjadi, serta ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai

dasar nasional, dan kadnungan budaya-budaya local dari satu generasi ke generasi berikutnya secara estafet.

- c. Koreksi (*to influence*). Pers adalah pilar keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (*watchdog function*). Dengan fungsi control sosial yang dimilikinya, pers senantiasa bersikap independen dan menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada.
- d. Rekreasi (*to entertain*). Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat.
- e. Mediasi (*to mediate*) atau penghubung. Bisa juga disebut mediator atau fasilitator. Dengan fungsi mediasi, pers mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain.

2.1.4.1. Kode Etik Jurnalistik

Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

menyatakan pada Selasa, 14 Maret 2006 di Jakarta, bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah :

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers
 - b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
 - d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas Jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b) Menghormati hak privasi;
 - c) Tidak menyuap;
 - d) Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
 - e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - f) Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 - g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri,
 - h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
- 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
 - b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a) Bohong berarti suatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau

tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

- e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas

sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

- b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya

d) “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

- b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak dari pihak luar.
- b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang

diberitakan oleh per, baik tentang dirinya maupun tentang oranglain.

- c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.¹

2.1.4.2. Elemen-elemen Jurnalisme

Dalam buku *Agama Saya Adalah Jurnalisme* karangan Andreas Harsono terdapat prinsip-prinsip dalam jurnalisme yang dirumuskan dalam Sembilan elemen jurnalisme ala Bill Kovach dan Tom Rosential, yaitu:

1. Kebenaran dalam tataran fungsionalitas dengan kata lain harus memilih kebenaran yang berguna.

Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mereka dapatkan untuk berdaulat. Bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai ini bukan sekedar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional.

¹ www.pwi.or.id/index.php/uu-kej diakses pada 27 Januari pukul 20.31

Contoh kebenaran fungsional, misalnya, polisi menangkap tersangka koruptor berdasarkan fakta yang diperoleh. Lalu kejaksaan membuat tuntutan dan tersangka itu diadili. Sesudah proses pengadilan, hakim memvonis, tersangka itu bersalah atau tidak bersalah. Apakah si tersangka yang divonis itu mutlak bersalah atau mutlak tidak-bersalah? Kita memang tak bisa mencapai suatu kebenaran mutlak. Tapi masyarakat kita, dalam konteks sosial yang ada, menerima proses pengadilan serta vonis bersalah atau tidak bersalah tersebut, karena memang hal itu diperlukan dan bisa dipraktikan. Jurnalisme juga bekerja seperti itu.

2. Loyalitas kepada masyarakat demi meningkatkan kepercayaan publik

Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya: lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi pemberitaan yang sukses. Namun, komitmen kesetiaan yang pertama adalah kepada warga, sebagai makna dari independensi jurnalistik.

3. Disiplin dalam melakukan Verifikasi

Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya.

4. Independensi dalam artian kesetiaan pada kebenaran sesuai dengan sudut pandangnya

Independensi semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi. Adalah penting untuk menjaga semacam jarak personal, agar jurnalis dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat penilaian independen. Sekarang ada kecenderungan media untuk menerapkan ketentuan “jarak” yang lebih ketat pada jurnalisnya. Misalnya, mereka tidak boleh menjadi pengurus parpol atau konsultan politik politisi tertentu.

5. Memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas

Prinsip pemantauan ini sering disalahpahami, bahkan oleh kalangan jurnalis sendiri, dengan mengartikannya sebagai “mengganggu pihak yang menikmati kenyamanan.” Prinsip pemantauan juga terancam oleh praktik penerapan yang berlebihan, atau “pengawasan” yang lebih bertujuan untuk memuaskan hasrat audiens pada sensasi, ketimbang untuk benar-benar melayani kepentingan umum.

Jadi, jurnalis tak sekedar memantau pemerintah, tapi semua lembaga kuat di masyarakat. Jurnalis juga mengangkat hak-hak suara pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri.

6. Sebagai forum publik

Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan kalangan ekonomi kuat saja atau bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan.

7. Harus memikat sekaligus relevan

Tulisan jurnalistik harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat.

8. Kewajiban menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif

Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif. Dengan mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta, kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Kita juga terbantu dalam memahami lebih baik ide keanekaragaman dalam berita.

9. Mendengarkan hati runarinya sendiri (punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggungjawab sosial).

Setiap jurnalis harus memiliki rasa etika dan tanggungjawab personal, atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggungjawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi

adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Gampangnya, mereka yang bekerja di organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga serta otoritas mapan, jika keadilan (*fairness*) dan akurasi mengharuskan mereka berbuat begitu. Dalam kaitan itu, pemilik media juga dituntut untuk melakukan hal yang sama.

(Andreas Harsono, 2010:16)

2.1.5. Tinjauan Tentang Surat Kabar

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar telah ada dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guttenberg di Jerman.

Sebagai media cetak, kelebihan surat kabar adalah sebagai catatan tertulis yang mampu merekam peristiwa/kejadian di masa lampau meskipun peristiwa itu sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu. Sehingga sangat disukai untuk dikliping atau diarsipkan sebagai dokumentasi peristiwa. (Tamburaka, 2013:45-46)

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan dan persuasif), fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah informasi. Hal

ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya, sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari berbagai jenis berita. Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun tidak terabaikan karena tersedianya rubric artikel ringan, *feature* (laporan perjalanan, lapiran tentang profil seseorang yang unik), rubrik cerita bergambar atau komik, serta cerita bersambung. Begitu pula dengan fungsinya mendidik dan memengaruhi akan ditemukan pada artikel ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. Fungsi pers, khususnya surat kabar pada perkembangannya bertambah, yakni sebagai alat control sosial yang konstruktif. (Ardianto, 2007:111-112)

Adapun karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup:

- a. Publisitas, yaitu penyebaran pada publik atau khalayak.
- b. Periodestas, menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan.
- c. Universalitas, menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia.
- d. Aktualitas, yang menurut kata asalnya, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”
- e. Terdokumentasikan. Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa

diantaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat kliping. (Ardianto, 2007:112-113)

2.1.6. Tinjauan Tentang Berita

Berita berasal dari bahasa sansekerta *Vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi”, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang telah terjadi”. Istilah *Write* (menulis) dalam bahasa Inggris berarti kata kerja yang menunjukkan aktifitas menulis. Sedangkan istilah *news* dalam bahasa Inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah *bericht (en)* dalam bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama dijajah Belanda. (Tamburaka, 2013:87)

Kemudian, menurut Kustadi Suhandang dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*, berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa actual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data di alam semesta ini, yang terjadinya pun actual dalam arti “baru saja” atau hangan dibicarakan orang banyak. (Suhandang, 2010:103)

Berita sendiri berbeda menurut karakteristik media massa, bila berita itu dimuat dalam media cetak koran dan majalah, maka ada ciri khasnya tersendiri yang lebih menekankan pada kekuatan *headline* (judul) berita, kepadatan informasi dalam bagan piramida terbalik, penempatan berita di halaman depan atau belakang, berita dengan foto atau tanpa foto, berita di halaman berwarna atau tidak berwarna. Gaya bahasa *straight news* atau *feature*, semuanya memainkan peranan penting dalam pembuatan berita di media cetak. (Tamburaka, 2013:89)

Sehingga saat ini sebenarnya surat kabar harus pandai dalam melihat kebutuhan pembaca. Oleh karena banyaknya sumber informasi selain surat kabar, maka cara peliputan berita juga sudah harus berubah dari *straight news* (berita langsung) ke *depth news* (berita mendalam) dengan teknik *feature*. Oleh karena surat kabar tidak mungkin bersaing dari segi aktualitas berita dengan radio, televisi dan internet. Berita mendalam dengan teknik *feature* akan lebih disukai karena akan membedakan dengan berita di media lain. (Tamburaka, 2013:47)

2.1.6.1. Jenis Berita

Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik dalam buku karangan AS Haris Sumadiria yang berjudul *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature* diantaranya:

1. *Straight news report*, adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa.
2. *Depth news report*, merupakan laporan yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.
3. *Comprehensive news*, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
4. *Interpretative report*, biasanya memfokuskan isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.
5. *Feature story*, menyajikan suatu pengalaman pembaca (*reading experience*) yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor dengan fakta yang menarik perhatian pembacanya.
6. *Depth reporting*, adalah pelaporan jurnalistik yang mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual.
7. *Investigative reporting*, berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretative. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi.
8. *Editorial writing*, penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum.
(Sumadira, 2014:69-71).

2.1.6.2. Unsur Kelayakan Berita

Kemudian, dalam buku karangan Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat yang berjudul *Jurnalistik; Teori & Praktik*, dibahas mengenai unsur-unsur kelayakan berita, diantaranya:

- Berita harus akurat,
- Berita harus lengkap, adil dan berimbang,
- Berita harus objektif,
- Berita harus ringkas dan jelas, dan
- Berita harus hangat. (Kusumaningrat, 2009:48-56)

2.1.6.3. Komposisi Berita

1. Kepala berita

Dikutip dari buku Mondry yang berjudul *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, kepala berita atau judul biasanya ditulis dengan kata dasar supaya jelas, tegas dan tidak panjang. (judul boleh dua baris dengan besar dan tebal huruf berbeda nyata, itu dilakukan karena kedua masalah yang diberitakan penting). Tetapi yang diharuskan, judul berita

tentu semenarik mungkin, tetapi tetap berdasarkan fakta, bukan karangan. (Mondry, 2008: 163)

Kepala berita sangat penting untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam berita. Digunakan untuk merangkum isi berita kepada pembaca mengenai isi berita. Kepala berita memiliki beberapa fungsi, yakni menarik minat pembaca, merangkum isi berita, dan melukiskan “suasana berita”.

2. Teras berita

Dikutip dari buku karangan Widodo yang berjudul *Teknik Wartawan; Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, bentuk teras berita ditinjau dari segi isi dan bahasa diantaranya:

- Teras berita yang menyimpulkan

Teras berita ini lebih sering disebut *conclusion lead*, atau *summary lead*. Ini sering dipakai dalam penulisan berita bentuk-bentuk interview.

- Teras berita pernyataan

Teras berita ini, berupa suatu pernyataan. Dalam ilmu komunikasi, khususnya bidang jurnalistik, sering disebut sebagai *statement lead*.

- Teras berita yang berlatar belakang

Teras berita ini memiliki latar belakang dan lazim disebut *back ground lead*. (Widodo, 1997:47)

3. Tubuh berita

Dikutip dari buku Ina Ratna Mariani dan June Kuncoro yang berjudul *Teknik Mencari dan Menulis Berita*, tubuh berita merupakan tempat di mana berita terletak. Setelah pembaca mengetahui secara ringkas isi berita melalui teras, maka penjelasan lebih lanjut dari berita ditemui dalam tubuh berita. Karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting, tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin, sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita (karena ruang yang terbatas dalam surat kabar). (Mariani, 2001:228)

Tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis maupun dengan susunan di mana informasi penting diletakkan di belakang. Selain teknik penulisan tubuh berita, membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci; memakai kata maupun frase transisi yang tepat serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir. Di samping itu, kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari

sumber berita; menyertakan nama/jabatan sumber berita (*attribution*); memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita serta menyertakan latar belakang berita. (Mariana, 2001:241)

2.1.6.4. Nilai Berita

Terlepas dari nilai berita yang sesungguhnya, harus diketahui juga bahwa setiap media memiliki isi media yang secara garis besar terbagi atas tiga kategori, yakni berita, opini, dan iklan. Karena ketiga kategori dimaksud secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap massa (khalayak) dari informasi berita yang disampaikan dapat membentuk opini publik.

Opini (*views*) merupakan salah satu produk jurnalistik yang meliputi artikel, tajuk rencana (*editorial*), karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Pemisahan secara tegas berita dan opini, merupakan konsekuensi dari norma dan etika luhur jurnalistik yang tidak mengkehendaki berita sebagai fakta objektif, diwarnai atau dibaurkan dengan opini sebagai pandangan yang sifatnya subjektif.

Secara umum iklan untuk berusaha untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan. Iklan merupakan pilihan yang paling sering diambil dalam mengerahkan kampanye promosi, karena iklan dapat membantuk kita untuk mencapai hampir setiap tujuan

komunikasi kita. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lain, periklanan adalah suatu sarana komunikasi yang dipergunakan dalam dunia perdagangan oleh produsen terhadap konsumen yang meraih lebih banyak calon pembeli dengan biaya lebih rendah, dalam waktu yang lebih singkat dan dengan pengaruh yang akan melekat lebih lama pada diri pemirsa.

Organisasi media tidak hanya mempunyai struktur dan pola kerja tertentu tapi juga mempunyai ideologi professional untuk menilai kualitas pekerjaan mereka. Ideologi professional wartawan yang paling jelas tentu saja apa itu berita dan berita apa yang baik. Semua itu mempunyai ukuran dan kriteria yang disebut nilai berita.

Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, menjelaskan bahwa nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Ini merupakan prosedur awal bagaimana peristiwa dikonstruksi. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk memilih sebuah realitas peristiwa oleh wartawan adalah ukuran professional yang dinamakan sebagai nilai berita. Secara umum, nilai berita tersebut dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.2.**Nilai-nilai Berita**

<i>Prominence</i>	Nilai berita diukur dari kebersaran peristiwanya atau arti pentingnya. Peristiwa yang diberikan adalah peristiwa yang dipandang penting. Kecelakaan yang menewaskan satu orang bukanlah berita, tetapi kecelakaan yang menewaskan satu baru bisa dianggap sebagai sebuah berita dibandingkan dengan kecelakaan pengendara sepeda motor.
<i>Human Interest</i>	Peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu lebih mengandung unsur haru, sedih dan menguras emosi khalayak. Peristiwa abang becak yang mengayuh dari Surabaya ke Jakarta lebih memungkinkan dipandang sebagai berita dibandingkan peristiwa abang becak yang mengayuh di Surabaya saja.
<i>Conflict/ Controversy</i>	Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Peristiwa kerusuhan antar penduduk pribumi dengan keturunan tionghoa misalnya, lebih layak disebut sebagai berita dibandingkan peristiwa sehari-hari antar penduduk pribumi.

<i>Unusual</i>	Sebuah peristiwa yang mengandung unsur ketidaklaziman atau jarang-jarang terjadi. Misalnya, seorang wanita melahirkan enam bayi sekaligus dalam keadaan selamat. Peristiwa demikian bisa disebut berita dibandingkan dengan peristiwa kelahiran normal satu bayi saja.
<i>Proximity</i>	Peristiwa atau kejadian yang dekat dengan jangkauan khalayak lebih layak diberitakan, dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari segi fisik maupun emosional dengan khalayak.

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing; Konstruksi, ideologi, dan politik media.

Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara

Table mengenai nilai berita di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang begitu banyak terjadi setiap hari, diseleksi dengan prosedur tertentu. Sehingga, suatu media dapat menentukan apa saja yang layak dan apa yang bisa disebut sebagai berita. Prosedur nilai berita dapat membatasi bahwa tidak semua peristiwa dapat diangkat menjadi sebuah berita. Semakin penting, jarang terjadi, dan semakin berkaitan dengan khalayak, maka suatu peristiwa dapat diajukan menjadi sebuah berita. Semua proses ini berkaitan dengan proses produksi berita, nilai-nilai dalam rutinitas kerja sebuah media massa ini terinternalisasi dan menjadi bagian penting dari kesadaran wartawan.

2.1.7. Tinjauan Berita Politik

Berita yang didasarkan pada topik masalah mencakup berbagai bidang yang sangat kompleks. Secara besarannya biasa dikelompokkan menjadi berita politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, olahraga, kriminal, dan lain-lain. Bila dilihat dari segi persoalannya, karena masalah politik memiliki hubungan yang erat dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan sebagainya, maka berita politik menempati posisi yang sangat penting dalam surat kabar. Selain itu, kebijakan-kebijakan politik juga menyentuh hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikutip dari buku karya Sedia Willing Barus yang berjudul *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita*, berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa di sekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan Negara. Politik di sini harus diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan, dan Negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup atau nasib bangsanya. (Barus, 2010:41)

Jadi, berita politik mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat. Tidak hanya menyangkut masalah kabinet, parlemen, penegak hukum, dan partai politik, tetapi juga masalah-masalah diplomasi dalam hubungan internasional dan politik lokal. Berita politik menjadi menu pokok isi media karena pengaruhnya cukup luas

dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Berita politik diminati karena akibat yang ditimbulkannya selalu menyentuh kehidupan masyarakat. Terlebih di alam demokrasi, berita politik akan menjadi kebutuhan vital bagi penikmat berita yang peduli nasib bangsa dan masa depan negaranya.

Jakob Oetama dalam Barus (2010) menggambarkan bahwa kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam arti luas, merasuki seluruh tubuh masyarakat sampai ke tingkat terbawah. Tali temalnya bersifat vertikal dan horizontal, dan dampak kebijakan dan tindakannya pun besar dalam masyarakat. (Barus, 2010: 42-43)

2.1.8. Tinjauan Reformasi TNI

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat menjadi TNI adalah nama sebuah angkatan perang Negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya sejak Indonesia merdeka, di masa 1945-1950 TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah kekuatan politik tanpa doktrin politik. Kemudian berangsur menjadi kekuatan politik dominan pada era Orde Baru.

“Kata orang, sulit untuk membayangkan politik di Indonesia tanpa memperhitungkan peran tentara di dalamnya. Atau sebaliknya, terlalu berlebihan bila masalah kenegaraan hanya diserahkan kepada kaum sipil. Khususnya sejak Pemerintahan Orde Baru, keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan non-militer di Indonesia dan khususnya politik, telah merupakan bagian integral dari dinamika serta dialektika kepolitikan nasional. Karena begitu besarnya pengaruh militer dalam politik,

maknanya tidak lagi hanya ditafsirkan sebagai bentuk dominasi, melainkan telah berubah menjadi fenomena hegemonik militer atas persoalan-persoalan sipil. Melalui doktrin Peran Sosial Politik TNI dan ketentuan perundangan yang mendasarinya, kemudian berbagai bentuk implementasinya-baik struktural maupun fungsional-semuanya menggaris-bawahi anggapan bahwa kehadiran TNI dalam kehidupan sosial politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan RI.” (Samego, 2000:46)

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah memberikan corak dan karakteristik tersendiri dalam hubungan kenegaraan sipil dan militer, yang berada pada domain militer.

“Sesuai dengan kebutuhan zaman, peran dan fungsi TNI pun harus senantiasa diperbaharui. Bila untuk menjadi sebuah kekuatan professional baik secara ideologis dan ekonomis masih belum memungkinkan, yang terbaik bagi TNI adalah menyesuaikan dengan perkembangan lingkungannya. Di masa lalu, TNI dianggap sebagai tentara revolusi, kemudian di zaman Pemerintahan Soeharto, TNI dipandang sebagai alat "stability and growth," sekarang, tentu harus berubah menjadi kekuatan reformasi yang menjunjung tinggi penegakan hukum, kesetaraan antarwarga serta proses demokratisasi dan perluasan partisipasi politik secara otonom.”(Samego, 2000:54)

Gerakan reformasi tahun 1998 adalah salah satu aspek pengaruh dinamika internal yang menjadi aspek bagi perumusan konsep Reformasi TNI. Peristiwa ini mendorong semangat untuk melakukan reorganisasi pada berbagai sektor, tak terkecuali ABRI saat itu. Kebutuhan mendasar untuk mendorong profesionalisasi prajurit, antara lain dengan menyempurnakan berbagai regulasi tentang tugas,

fungsi, kewenangan dan posisi prajurit serta aspek-aspek lain menyangkut sisi lain prajurit.

“Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatoris. Seiring dengan arus deras demokratisasi dan dengan melihat keadaan strategis dalam negeri yang menghendaki adanya berbagai tuntutan tersebut, akhirnya ABRI menyadari untuk segera melakukan reformasi internal seperti diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/’98 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, utamanya tentang agenda penyesuaian implementasi Dwi Fungsi TNI dengan paradigma baru peran TNI dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.” (Yulianto, 2002:351-352)

Pertimbangan mendasar yang menjadi latar belakang keputusan politis dan akademis reformasi internal TNI saat itu antara lain:

Perubahan yang begitu cepat menjadikan dunia berubah, keadaan berubah termasuk di dalam negeri berubah, untuk itu pun TNI-pun harus berubah.

- 1) Prediksi tantangan TNI kedepan di abad XXI ini begitu besar, kompleks dan multidimensional, atas dasar itu TNI harus segera menyesuaikan diri.
- 2) TNI senantiasa dan harus mau dan mampu mendengar aspirasi dan respon rakyat.
- 3) TNI mengakui secara jujur, jernih, dan obyektif, sebagaimana komponen bangsa yang lainnya, bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orde Baru.

Melalui berbagai pertimbangan di atas dan berdasarkan berbagai tuntutan lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka ABRI mengeluarkan pernyataan bahwa ABRI akan melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan berbangsa. Bertepatan pada hari ABRI, tanggal 5 Oktober 1998, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengeluarkan buku yang berjudul “ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Berbangsa”. Apa yang dimaksud dengan Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Redefinisi. Dwi Fungsi ABRI pada masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini Dwifungsi didefinisikan dengan kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi secara utuh sehingga tidak ada lagi peran dikotomis dan distingif.
- b) Reposisi. Reposisi diformulasikan sebagai penataan posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi sebagai kotakasa reformasi dengan ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping pro-aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga concern dalam pembangunan nasional.

- c) Reaktualisasi. Dalam Reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. (Yulianto, 2002: 352-353)

Berikut adalah *progress* implementasi Reformasi Internal TNI sejak awal 1998 sampai awal tahun 2007, sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Progress Reformasi Internal TNI 1998-2007

No.	TAHUN	PROGRES PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	1998	Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI tentang Paradigma Baru Peran ABRI Abad XXI.	Paradigma Baru (Kultur / Perilaku)
2.	1998	Penyempurnaan organisasi Staf Umum (Sum) ABRI dan Staf Sosial Politik (Sospol) ABRI. Kepala Staf Sosial Politik ABRI (Kas Sospol ABRI) menjadi Kepala Staf Teritorial ABRI (Kaster ABRI).	Struktur, Final
3.	1998	Likuidasi Syawan ABRI, Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.	Struktur, Final
4.	1998	Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda Tk-I.	Struktur, Final
5.	1999	Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI tentang Paradigma Baru Peran Sospol ABRI.	Paradigma Baru (Kultur / Perilaku), Final
6.	1999	Paradigma baru hubungan ABRI/TNI dan keluarga besar ABRI/TNI (KBA/KBT) dan pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan	Kultur / Perilaku, Final

		mengambil jarak dengan semua partai politik yang ada.	
7.	1999	Pengaturan penugasan prajurit di luar jabatan struktur/fungsional Dephankam/ABRI.	Struktur, Final
8.	1999	Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensuin atau alih status.	Struktur, Final
9.	1999	Pemisahan POLRI dari ABRI.	Struktur, Final
10.	1999	Pengsahan sebutan nama kesatuan, jabatan, kopstuk tulisan dinas, lambing dan cap dinas dari sebutan ABRI menjadi TNI.	Kultur, Struktur, Final
11.	1999	Pengurangan jumlah F. ABRI di DPR, DPRD I/II (di DPR Pusat dari 75 orang menjadi 38 orang dan di DPRD I/II tinggal 10% dari jumlah kursi).	Struktur, Final
12.	1999	Komitmen Netralitas TNI dalam Pemilu.	Kultur / Perilaku, Final
13.	1999	Perubahan Staff Sosial Politik (Sospol) menjadi Staf Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai transisi pada 2001.	Struktur, Transisi
14.	1999	Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim sebagai konsekuensi dihapuskannya fungsi Sospol ABRI.	Struktur, Final
15.	2000 s/d 2001	Revisi piranti lunak Doktrin TNI AU (<i>17 Oktober 2000</i>), TNI AD (<i>15 Desember 2001</i>), dan TNI AL (<i>23 Februari 2001</i>)	Doktrin, Penyesuaian
16.	2000	Likuidasi organisasi Wakil Panglima TNI.	Struktur, Final
17.	2000	ABRI meninggalkan politik praktis dan tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis.	Struktur, Kultur/Perilaku, Final
18.	2000	Penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda.	Struktur, Final

19.	2001	Menerapkan sikap Netralitas TNI sebagai alat Negara pada Sidang Istimewa MPR-RI 2001	Kultur, Final
20.	2001	Penghapusan materi Sospol ABRI dari kurikulum Pendidikan TNI dan penambahan materi hukum, HAM dan lingkungan hidup.	Penyesuaian Doktrin, Kultur
21.	2002	Redefinisi dan refungsionalisasi Koter.	Struktur, Kultur/Perilaku, Final
22.	2004	Komitmen dan Netralitas TNI dalam Pemilu 2004	Kultur, Final
23.	2004	Pernarikan dan penghentian personel TNI yang ditugaskan baik secara resmi maupun tidak resmi pada institusi pemerintah dan non pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan tugas TNI.	Struktur, Final
24.	2004	Likuidasi Fraksi TNI-POLRI di DPR dan DPRD pada tahun 2004 dan percepatan berakhirnya keberadaan Fraksi TNI di MPR-RI pada tahun 2004 dari yang semestinya (yang secara konstitusional diamanatkan sesuai Tap MPR Nomor : VII/MPR/2000) sampai dengan tahun 2009.	Komitmen, Penyesuaian Doktrin, Final
25.	2004	Peradilan militer yang selama ini berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI sekarang berada di bawah Mahkamah Agung.	UU, Struktur, Kultur, Final. Proses pada Pemerintah
26.	2004	Lahirnya Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI.	Struktur, Final
27.	2005	Likuidasi Staf Komsos pada tahun 2005. (<i>1 Juni 2005</i>).	Struktur, Final
28.	2005	Netralitas TNI dalam Pilkada.	Kultur / Perilaku

29.	2006	Penghapusan Bisnis Militer.	Keputusan final, Proses pada Pemerintah
30.	2006	Keputusan harus pension terlebih dahulu sejak tahap penyaringan bagi prajurit TNI yang akan ikut Pilkada.	Struktur, Final
31.	2007	Pengesahan Doktrin TNI.	Doktrin, Final

Diolah dari beberapa dokumen, ST, STR, Skep, Juklak, Surat Edaran Menhankam/Pangab/Panglima TNI yang ada sampai dengan tahun 2007 dan hasil wawancara. (Basuki, 2013: 140-143)

Pada saat Orde Baru jatuh dan reformasi digaungkan, para perwira TNI berangsur-angsur sadar mengenai betapa mereka setelah sekian lama disalahgunakan sebagai alat kekuasaan yang meladeni kehendak penguasa Orde Baru. Muncul penilaian bahwa Dwifungsi TNI adalah eksektif atau mengalami disfungsi. Dan agenda Reformasi TNI memuncak pada Rapat Pimpinan TNI di Jakarta pada bulan April tahun 2000. Dalam rapat itulah doktrin Dwifungsi TNI yang telah bertahun-tahun lamanya menduduki posisi yang sakral mulai ditinggalkan.

Rapim TNI bulan April tahun 2000 juga memutuskan bahwa ABRI meninggalkan politik praktis dan tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis. Dihadapkan dengan tantangan tugas yang terus berkembang, TNI terus menerus berupaya memformulasikan tugasnya ke depan. Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hankamneg, formulasi sementara Tugas Pokok TNI saat ini adalah: *Sebagai komponen utama pertahanan Negara bertugas menggagalkan*

setiap agresi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, serta menjamin kepentingan nasional Republik Indonesia baik pada lingkup domestik maupun lingkup Internasional. (Basuki, 2013: 164-165)

Kemudian, menyikapi adanya Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001, dengan turut mendukung mekanisme kontitusinal Sidang Istimewa MPR dalam suksesi kepemimpinan dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri. Sekaligus mendukung Wakil Presiden terpilih Hamzah Haz melalui mekanisme SI MPR tahun 2001 tersebut. Sikap netralitas TNI sebagai alat Negara diterapkan dan diimplementasikan pada Sidang Istimewa MPR-RI tahun 2001 tersebut. (Basuki, 2013: 166-167)

Institusi TNI dengan segenap prajurit TNI menerapkan sikap netralitasnya dalam Pemilu anggota MPR-RI, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 dan tidak menggunakan hak memilihnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Demikian juga halnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Sikap netralitas ini telah ikut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu tersebut. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2004, tidak diperoleh adanya pelanggaran signifikan prajurit TNI, kecuali 2 (dua) catatan pelanggaran terbatas yang bersifat oknum yaitu; *Pertama*, bantuan kendaraan bus kepada Ibu-ibu kelompok Majelis Taklim yang melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Ternyata diluar sepengetahuan para pengemudi atau Komandan

Satuan Angkutan Detasemen Mabes TNI. Mereka datang ke Pesantren Al-Zaitun untuk menggunakan hak pilih atau pencoblosan. Meskipun demikian Mabes TNI memandang sebagai suatu kesalahan sehingga Pimpinan TNI mengambil tindakan melepas jabatan Komandan Satuan Angkutan Detasemen Markas (Dansatang Denma) Mabes TNI dan menjatuhkan hukuman *skorsing* kepada para pengemudi bus yang mengangkut rombongan tersebut. *Kedua*, adanya seorang oknum Bintara TNI yang mempunyai kegiatan persewaan mobil. Mobilnya disewakan kepada sekelompok orang yang mengikuti kampanye suatu partai tertentu, sementara anggota tersebut menjadi pengemudi dari mobil sewaanannya. (Basuki, 2013: 174-178)

2004 juga menjadi tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hadirnya Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 ini merupakan salah satu wujud telah dilaksanakannya Reformasi Internal TNI karena Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia dan demokrasi serta perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, telah diatur secara jelas tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi dan tugas, postur dan organisasi, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta

tentang Prajurit secara lengkap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.

Hal-hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah dicantumkan pasal 39 yang mengatur tentang larangan bagi anggota TNI. Pasal tersebut berbunyi Prajurit dilarang terlibat dalam:

- a. Kegiatan menjadi anggota partai politik
- b. Kegiatan politik praktis
- c. Kegiatan bisnis, dan
- d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam Pemilihan

Umum dan jabatan politis lainnya. (Basuki, 2013: 182-183)

Kemudian, disebutkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 5: “TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.” Kemudian pasal 7: “Tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.”

2.1.9. Konstruksi Realitas Media Massa

Realitas sosial yang disajikan oleh media adalah realitas hasil *framing* yang dimaknai melalui proses konstruksi sosial. Hal ini tergantung darimana media tersebut mengkonstruksikan peristiwa menjadi aspek-aspek realitas yang kemudian menjadi berita untuk dimaknai dan dipahami oleh khalayak pembaca. Maka, analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Seperti pada pemberitaan mengenai reformasi TNI di Koran Tempo pada 7 Februari 2018.

Realitas yang dihasilkan dari sebuah konstruksi merupakan realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif dapat dilihat berdasarkan kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sementara realitas subjektif lebih menekankan kepada nilai makna, interpretasi dan hasil relasi setiap individu. Semua itu didasari berdasarkan bagaimana cara individu menilai atau melihat suatu peristiwa.

Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut diantaranya:

1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Realitas bersifat subjektif karena realitas tercipta lewat konstruksi atau sudut pandang

wartawan, realitas bisa berbeda-beda tergantung dari bagaimana wartawan menilai sebuah realitas. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan berita. Fakta atau realitas adalah pada dasarnya hasil konstruksi. Manusia membentuk dunia mereka sendiri.

2. Media adalah agen konstruksi. Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang kita baca bukanlah hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrument yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Apa yang tersaji dalam berita dan kita baca tiap hari, adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.
3. Berita bukan hanya refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas. Berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu

melibatkan pandangan, ideology, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan tertentu selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Berita bukanlah representasi dari realitas. Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik.

4. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Karenanya, ukuran yang baku dan standar tidak bisa dipakai. Kalau ada perbedaan berita dengan realitas yang sebenarnya, maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang seperti itulah pemaknaan mereka atas realitas. Di sini, yang dipersoalkan bukan bias, seperti dalam pendekatan positivis.
5. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas. Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena ia merupakan bagian yang intrinsik dalam pembentukan berita. Lagian, berita bukan hanya produk individual, melainkan

juga merupakan bagian dari organisasi dan interaksi antara wartawan. Wartawan bukanlah pemulung yang mengambil fakta begitu saja. Karena dalam kenyataannya tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan bersifat objektif, yang berada di luar diri wartawan.

6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu – umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu – adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas.
7. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Khalayak bukan dilihat hanya sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. kenapa? Dalam bahasa Stuart Hall, makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan/berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial memiliki banyak arti (*polisemi*). Makna lebih tepat dipahami bukan sebagai transmisi dari pembuat berita kepada pembaca. Ia lebih tepat dipahami sebagai praktik penandaan. Karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemahaman yang berbeda atas teks yang sama. Kalau saja ada makna yang dominan atau tunggal, itu bukan berarti makna

terdapat dalam teks, tetapi begitulah praktik penandaan yang terjadi.

(Eriyanto, 2002:19-36)

Kemudian, Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Sosial Media Massa* yang mengutip dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, menjelaskan bahwa:

“Konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Konstruksi sosial dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial itu adalah realitas sosial yang berupa realitas obyektif, subyektif, maupun simbolis. Sedangkan materi realitas sosial itu adalah konsep-konsep, kesadaran umum, dan wacana publik”. (Berger dan Luckmann, dalam Bungin, 2008:212)

Gagasan dari Berger tersebut dapat diimplementasikan ke dalam sebuah berita dimana wartawan melihat sebuah peristiwa yang terjadi namun setiap wartawan memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat peristiwa tersebut. Hal ini didasari dari berita yang dibuat oleh wartawan, walaupun kasus yang dihadapi sama tapi cara penyampaian isi berita berbeda. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan sebuah peristiwa atau fakta yang riil berita adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam prosesnya

wartawan dilandasi oleh realitas, dimana realitas dimaknai oleh wartawan untuk menghasilkan sebuah realitas yang dituangkan ke dalam teks berita.

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas melihat fenomena media massa menjadi sangat substansial dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi realitas media massa”.

“Substansi dari “konstruksi realitas media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang lebih cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya pun merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga memnbentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.” (Bungin,2008:194)

2.1.9.1. Proses dan Tahap Konstruksi Sosial Media Massa

Kemudian, Bungin dalam bukunya juga menjelaskan proses dan tahapan konstruksi sosial media massa yang dapat dilihat melalui tahapan berikut ini:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi realitas media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada *desk* editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki *desk* yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media.

Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan tiga hal, yaitu kedudukan (takhta), harta, dan perempuan. Fokus pada kedudukan termasuk juga adalah persoalan jabatan, pejabat, dan kinerja birokrasi dan layanan publik. Sedangkan yang berhubungan dengan harta menyangkut persoalan kekayaan, kemewahan materi, termasuk juga adalah persoalan korupsi dan sebagainya. Masalah perempuan menyangkut aurat, wanita cantik dan segala macam aktivitas mereka, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan dan harta.

Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial, yaitu:

- a. Keberpihakan media kepada kapitalisme. Dalam arti media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan capital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelibatkandaan modal. Semua elemen media massa, termasuk orang-orang media massa berpikir untuk melayani kapitalisnya ideologi mereka adalah membuat media massa yang laku di masyarakat.
- b. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-

ujungnya adalah juga untuk “menjual berita” dan menaikkan *rating* untuk kepentingan kapitalis.

- c. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

2. Tahap sebaran Konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real time*. Bagi media cetak, yang dimaksud dengan *real time* terdiri dari beberapa konsep hari, minggu atau bulan, seperti terbitan beberapa mingguan atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep *real time* yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitasnya menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepat-cepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang

dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas

- a. Pembentukan konstruksi di masyarakat, melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. *Pertama*, konstruksi realitas membenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di dalam masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran. *Kedua* adalah kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap yang pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. *Ketiga* adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang secara *habit* tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan.
- b. Pembentukan konstruksi citra, adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Di mana bangunan

konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model : (1) model *good news* yang adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Kemudian (2) model *bad news* yang adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

Untuk media massa, realitas citra media dikonstruksi orang oleh *desk* dan redaksi, namun merupakan bagian dari rekonstruksi sosial masyarakatnya.

4. Tahap konfirmasi

Tahap ini adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi

terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Alasan-alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini adalah umpamanya: (a) Kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa. (b) Kedekatan dengan media massa adalah *life style* orang modern, di mana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa itu sendiri. Dan (c) Media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subyektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses. (Bungin, 2008:195-201)

2.1.10. Tinjauan Konsep *Framing*

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah bagian tertentu dari realitas yang menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media massa. Aspek-aspek yang tidak diberitakan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi

terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Di sini media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2002:66-67)

Tabel 2.4.

Definisi Framing

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak

	menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow and Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menepatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing; Konstruksi, ideologi, dan politik media.

Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Framing, seperti dikatakan Todd Gitlin, adalah sebuah strategi bagaimana realitas/ dunia dibentuk dan disederhanakan

sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas. Gitlin, dengan mengutip Erving Goffman, menjelaskan bagaimana frame media tersebut terbentuk. Kita setiap hari membingkai dan membungkus realitas dalam aturan tertentu, kemasan tertentu, dan menyederhanakannya, serta memilih apa yang tersedia dalam pikiran dan tindakan. Menurut Gitlin, frame media pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan frame dalam pengertian sehari-hari yang seringkali kita lakukan. Setiap hari jurnalis berhadapan dengan beragam peristiwa dengan berbagai pandangan dan kompleksitasnya. Lewat Frame, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks itu menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak. Laporan berita yang akhirnya ditulis oleh wartawan pada akhirnya menampilkan apa yang dianggap penting, apa yang perlu ditonjolkan, dan apa yang perlu disampaikan oleh wartawan kepada khalayak pembaca. Frame media dengan demikian adalah bentuk yang muncul dari pikiran (kognisi), penafsiran, dan penyajian, dari seleksi, penekanan, dan pengucilan dengan menggunakan symbol-simbol yang dilakukan secara teratur dalam wacana yang terorganisir, baik dalam bentuk verbal maupun visual. Menurut Gitlin, frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik. Dengan frame, jurnalis memproses berbagai informasi yang tersedia dengan jalan mengemasnya sedemikian rupa dalam

kategori kognitif tertentu dan disampaikan kepada khalayak. Secara luas, pendefinisian masalah ini menyertakan di dalamnya konsepsi dan skema interpretasi wartawan. Pesan, secara simbolik menyertakan sikap dan nilai. Ia hidup, membentuk, dan menginterpretasikan makna di dalamnya. (Eriyanto, 2002:68-69)

2.2. Kerangka Pemikiran

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tiga proses ini terjadi di antara individu satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan internalisasi yaitu proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu tersebut menjadi anggotanya.

Atas dasar pemikiran semacam itulah kaum konstruktivis memiliki pandangan tersendiri dalam melihat wartawan, media dan berita. Konsep mengenai konstruksionisme ini diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Luckman melalui "*The Social Constuction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1996). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. (Bungin, 2008:213)

Dengan menggunakan pendekatan konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann, peneliti akan mengidentifikasi tahapan dari proses konstruksi wartawan sebagai penulis berita dan Koran Tempo sebagai media massa.

Selanjutnya, pada konsep analisis framing Robert N. Entman, untuk mendapatkan aspek-aspek dari realitas yang dilakukan oleh media dapat dilihat dan dianalisis dengan pendefinisian suatu isu (*define problems*), yaitu elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana masalah atau peristiwa tersebut dipahami. (Eriyanto, 2002:225)

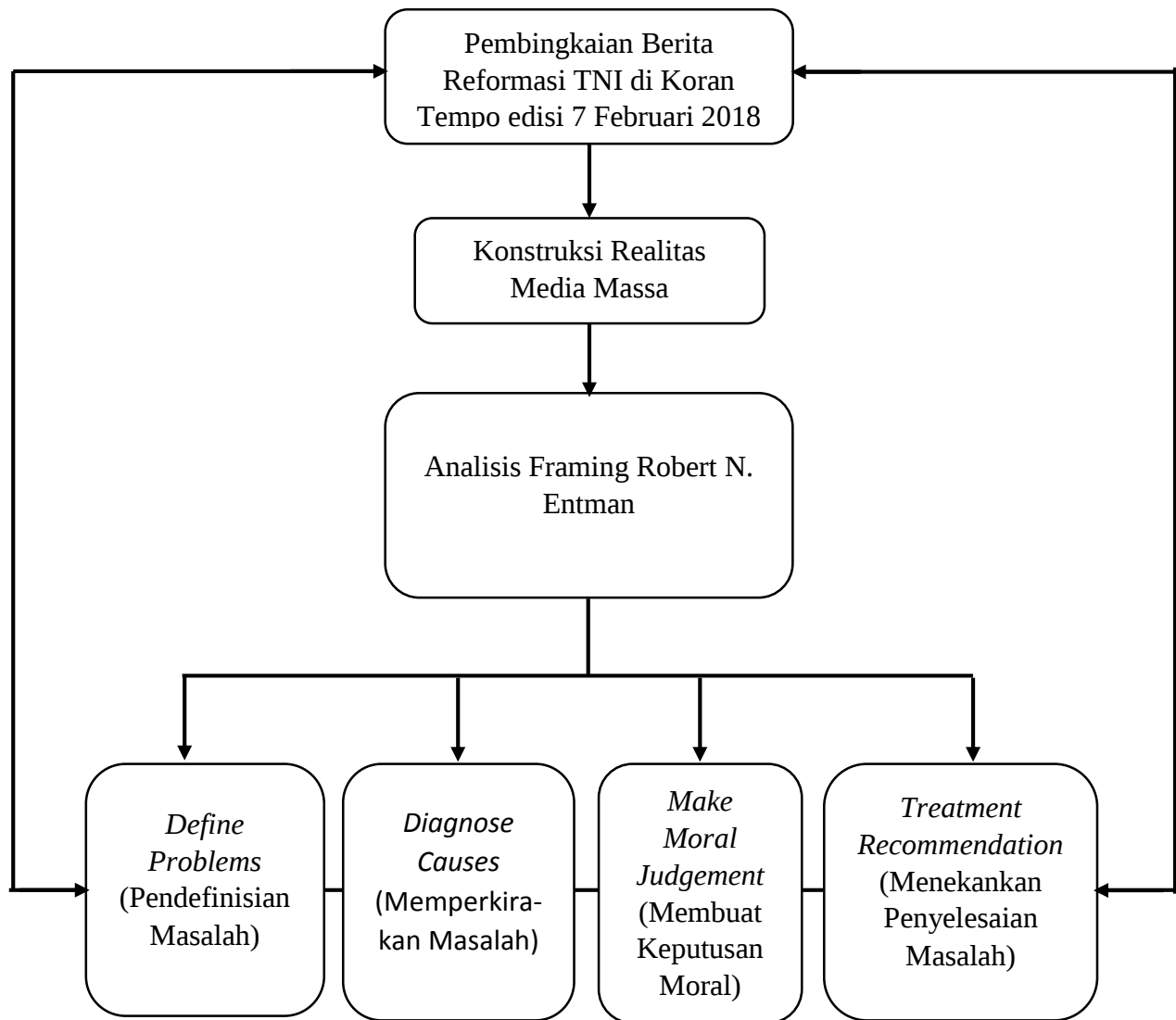
Memperkirakan masalah (*diagnose causes*), merupakan elemen framing yang membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. (Eriyanto, 2002:225)

Membuat keputusan moral (*make moral judgement*), adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. (Eriyanto, 2002:226)

Menekankan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*), elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2002:227)

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan bagaimana cara media massa Koran Tempo membingkai berita mengenai reformasi TNI pada 7 Februari 2018. Menurut Entman, media melakukan pembedingkaian berita dengan cara mengkonstruksi dan memproses peristiwa. Untuk menunjukan sebuah pembedingkaian berita oleh media dapat dilakukan dengan melihat pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2018